

Perceraian Di Jawa Barat Pada Masa Pandemi : Studi Literatur

Divorce in West Java During the Pandemic: Literature Study

Aris Tristanto dan Yunilisiah
Magister Kesejahteraan Sosial Pasca sarjana FISIP Universitas Bengkulu
Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu.
email : tristanto29@gmail.com

Abstract

One of the provinces in Indonesia with the highest divorce rate during the COVID-19 pandemic is West Java. This paper is a literature review that aims to describe the relationship between the Covid-19 pandemic and the high divorce rate in West Java. The data analysis technique in this paper is the content analysis method. The problem of divorce during the Covid-19 pandemic occurred in all urban districts in West Java. In general, the factors that cause divorce in West Java are not only caused by one factor but many factors such as economic problems, disharmony, domestic violence, and age in fostering marital relationships. Responding to the increase in divorce cases during the Covid-19 pandemic, the West Java government is trying to suppress this by optimizing various existing programs both at national and regional levels. To reduce the divorce rate, the author suggests that each couple be able to emotionally regulate their own emotions and make room for others to understand them. In addition, the authors suggest that the government can strengthen family resilience by optimizing the organization, mobilization and strengthening of society through agents of change in society.

Keywords: *Divorce, Pandemic COVID-19, West Java.*

Abstrak

Salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat perceraian tertinggi selama pandemi COVID-19 adalah Jawa Barat. Tulisan ini adalah kajian literatur yang bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara pandemi Covid-19 dengan tingginya angka perceraian di Jawa Barat. Analisis data dalam tulisan ini yaitu metode analisis isi. Permasalahan perceraian saat pandemi COVID-19 terjadi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Secara umum faktor penyebab perceraian di Jawa Barat tidak disebabkan karena satu faktor tetapi banyak faktor seperti masalah ekonomi, ketidakharmonisan, kekerasan dalam rumah tangga, dan usia dalam membina hubungan pernikahan. Menyikapi peningkatan perceraian pada saat pandemi COVID-19, pemerintah Jawa Barat berupaya menekan hal tersebut dengan mengoptimalkan program yang telah ada. Untuk menekan angka perceraian, penulis menyarankan agar setiap pasangan mampu secara emosional mengatur emosinya serta memberikan ruang untuk orang lain agar memahaminya. Selain itu penulis menyarankan agar pemerintah dapat memperkuat ketahanan keluarga dengan mengoptimalkan pengorganisasian, penggerakan dan penguatan masyarakat melalui agen perubahan yang ada di masyarakat.

Kata Kunci : Perceraian, Pandemi COVID-19, Jawa Barat.

PENDAHULUAN

COVID-19 (*Corona disease 2019*) adalah bencana global yang berdampak kepada berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan dan ekonomi (Tristanto, 2020a). Badan Pusat Statistik RI merilis situasi ekonomi Indonesia pada kuartal ke II (Q2) tahun 2020 mengalami kontraksi ekonomi sebesar 5,32 % *year non year*. Sedangkan apabila dilihat dari quarter to quarter (qtoq) pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II (Q2) tahun 2020 minus 4,19 % (Vincent, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian Fauzia et al, (2020) diketahui bahwa efek yang ditimbulkan dari

terganggunya perekonomian pada saat pandemi adalah angka perceraian di Indonesia meningkat sebesar 5%. Pandemi, ekonomi dan perceraian memiliki keterkaitan disebabkan oleh banyak terjadi pemecatan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi COVID-19 sehingga ekonomi keluarga yang mengalami PHK menjadi melemah. Hal tersebut memicu tekanan dan menyebabkan emosi berlebihan pada suami ataupun istri sehingga terjadi konflik dalam rumah tangga (Ferdiaz, 2020; Tristanto, 2022a). Konflik tersebut sebagian besar terjadi pada perempuan karena peningkatan beban sosial perempuan di

masa pandemi (Hutabarat et al, 2020; Bakhtiar, 2020).

Di Indonesia, provinsi yang mengalami peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi berada di pulau jawa (Apriasar, *et al*, 2021). Provinsi tersebut yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Tengah. Apabila diurutkan dari tinggi ke yang rendah, Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat perceraian tertinggi selama pandemi COVID-19, setelah itu diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur (Tristanto, 2020b). Terkait dengan provinsi diluar pulau jawa, belum mengalami penambahan kasus perceraian pada saat pandemi secara signifikan (Yusuf, 2020)

Tingginya angka perceraian di Provinsi Jawa Barat pada saat pandemi COVID-19 dapat terlihat dari halaman website Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Tercatat 51.664 cerai gugat dan 17.397 talak yang diakumulasikan sejak 2020 hingga 7 September 2020. Dari sembilan bulan tersebut, pengajuan kasus perceraian yang paling banyak adalah bulan Juni dan Juli dengan jumlah kasus mencapai 12.603 kasus di bulan Juni, dan 11.778 kasus di bulan Juli. Pada bulan lainnya, pengajuan kasus hanya berkisar antara 2.000 kasus sampai dengan 8.000 kasus perbulan (Wahyu, 2020).

Berdasarkan data tersebut penulis tertarik untuk memilih Jawa Barat sebagai studi kasus dalam tulisan ini dengan berbagai pertimbangan yaitu: 1) tingkat perceraian pada masa pandemi di Jawa Barat tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi telah menjalar sampai ke kabupaten; 2) masyarakat di Provinsi Jawa Barat memiliki nilai dan budaya lokal yang sangat kental dan dapat dijadikan sebagai modal sosial dalam mencegah perceraian di masyarakat pada saat pandemi COVID-19. Beranjak dari latar belakang diatas, maka penulis mencoba menggambarkan kasus perceraian di Provinsi Jawa Barat pada saat pandemi COVID-19

METODE

Penelitian ini merupakan kajian pustaka yang dilakukan dengan cara menelaah sumber terpercaya dalam bentuk tulisan tanpa turun langsung kelapangan (Hadi, 1995; Muhadjir 1995). Menurut Sugiyono (2012) studi pustaka merupakan kajian teoritis, referensi, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan budaya, nilai serta norma yang berkembang pada situasi sosial.

Teknik analisis data yang dalam penelitian ini adalah analisis isi. Hal tersebut digunakan agar mendapatkan kesimpulan yang dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya (Krippendorff, 1993; Sabarguna, 2005). Analisis isi merupakan metodologi dalam paradigma kritis, kekuatan analisis isi adalah kemampuannya melihat bagaimana media dan bahasa digunakan mendistorsikan realitas (Eriyanto, 2001). Melalui analisis ini maka akan dilakukan proses pemilihan, perbandingan, dan penggabungan berbagai pengertian yang relevan terkait dengan masalah perceraian di Jawa Barat.

Sumber data dalam penelitian terdiri dari dua sumber yaitu primer dan sekunder. Sumber primer adalah referensi yang dijadikan sumber utama dan dijadikan sebagai acuan pada tulisan ini. Sedangkan sumber sekunder adalah suatu referensi pendukung dan pelengkap dalam tulisan ini. Dalam penelitian ini sumber sekunder berupa, Prosiding Seminar Webinar 7 th Internasioanal Academia rountable forum (25 Juli 2020), jurnal ilmu sosial yang terindeks sinta, dan artikel berita terkait dengan masalah perceraian di Jawa Barat dan pandemi COVID-19.

Langkah yang digunakan dalam mengumpulkan pada tulisan ini adalah memilih topik, eksplorasi informasi, menentukan fokus, pengumpulan sumber data, persiapan penyajian data, dan terakhir penyusunan laporan.

Metode dan langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam tulisan ini adalah memilih topik dengan perceraian pada masa pandemi COVID-19, eksplorasi informasi, menentukan fokus, pengumpulan sumber data, persiapan penyajian data, dan terakhir penyusunan laporan.

Penyajian data dalam tulisan ini berbentuk kata yang memerlukan pengolahan agar ringkas dan sistematis (Muhadjir, 1998). Terkait dengan instrumen yang dipakai penulis dalam tulisan ini adalah checklist, klasifikasi bahan tulisan skema atau peta penulisan, dan format catatan dari penulis.

HASIL PENELITIAN

Jawa Barat menjadi provinsi terbanyak menyumbangkan angka perceraian pada masa pandemi COVID-19. Sampai dengan minggu pertama September 2020, jumlah angka perceraian di Jawa Barat akibat dari perselisihan atau pertengkaran adalah 30.206 kasus.

Sedangkan, akibat dari masalah ekonomi berjumlah 24.392 kasus (Ranawati, 2020). Perselisihan dan ekonomi memiliki keterkaitan satu sama lain karena akibat dari pandemi banyak suami yang kehilangan pekerjaan sehingga berdampak pada masalah ekonomi keluarga. Hal tersebut merupakan gangguan serius dalam rumah tangga karena tanggung jawab istri bertambah besar karena harus memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila hal tersebut terus dibiarkan maka akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Disaat konflik tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga berlarut-larut maka perceraian menjadi jalan keluarnya (Bakhtiar, 2020).

Hal tersebut seperti sebuah video yang menjadi trending topik Twitter pada hari Senin, 28 Agustus 2020 dalam singkat tersebut diperlihatkan puluhan pasangan suami istri mengantri panjang di Pengadilan Agama Kabupaten Badung. Berdasarkan keterangan sang pemilik akun Twitter @stefhaniequeen, menjelaskan bahwa kerukunan dalam video tersebut bukanlah terkait dengan kegiatan pembagian sembako, melainkan kerumunan pasangan suami istri yang akan mengikuti perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bandung. Fenomena yang menjadi viral media sosial twitter tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Bandung saja tetapi di beberapa daerah lain di Jawa Barat (Tristanto et al, 2022b).

Berdasarkan fenomena perceraian di berbagai daerah di Jawa Barat maka penulis mencoba melakukan penelusuran selama bulan Desember 2020 melalui mesin pencari *google* dengan kata kunci perceraian pada masa pandemi di Jawa Barat. Dalam penelusuran tersebut penulis menemukan data dari berbagai media massa online terkait publikasi tentang frekuensi perceraian dari berbagai kabupaten kota di Jawa Barat. Hasil penelusuran tersebut selanjutnya dirangkum oleh penulis berdasarkan pembagian dalam empat Badan Koordinasi Pemerintah Pembangunan (Bakor PP) Wilayah I Bogor, Wilayah II Purwakarta, Wilayah III Cirebon, dan Wilayah IV Priangan (Rifi'I, 2000). Pembagian wilayah tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. berikut.

Tabel 1. Empat Badan Koordinasi Pemerintah Pembangunan (Bakor PP)

Wilayah	Kabupaten/Kota
Bogor	Kab Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kab Cianjur
Purwakarta	Kab Purwakarta, Kab Subang, Kab Karawang, Kab Bekasi, dan Kota Bekasi
Cirebon	Kab Cirebon, Kota Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, dan Kab Kuningan
Priangan	Kab Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat, Kab Sumedang, Kab Garut, Kab Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, dan Kota Banjar

Sumber : Rifi'I, 2000

Wilayah I Bogor meliputi Kab Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kab Cianjur. Berdasarkan hasil penelusuran diketahui bahwa sepanjang tahun 2020, Pengadilan Agama Kelas 1A Cibinong, menangani 4.117 perkara. Dari ribuan perkara tersebut, 90 persen diantaranya merupakan kasus perceraian (Agustin, 2020). Terkait dengan Kota Bogor, berdasarkan berita yang dirilis oleh Pikiran Rakyat.com diketahui bahwa kasus perceraian di Kota Bogor melonjak tajam sesuai Pengadilan Agama Kota Bogor membuka layanan tatap muka pada saat telah diterapkannya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Berdasarkan jumlah perkara masuk, Pengadilan Agama Kota Bogor mendapatkan kurang lebih 100 laporan setiap harinya (Sumardiyani, 2020).

Tidak jauh berbeda dari Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, dikutip dari Kompas.com diketahui bahwa Kabupaten Cianjur juga mengalami peningkatan perceraian pada saat pandemi. Data dari Pengadilan Agama Cianjur, mencatat jumlah kasus perceraian yang ditangani pada periode Januari hingga Juni 2020 mencapai 2.049 perkara yang terdiri dari cerai gugat dan cerai talak (Taufiqurahman, 2020). Sama halnya dengan Kabupaten Cianjur, dilansir dari Pikiran Rakyat.com, kasus perceraian di Kabupaten Sukabumi dari Maret hingga Juli 2020 telah menembus angka 5.000 kasus (Rayadie, 2020).

Terkait dengan kota Sukabumi, dilansir dari Jabar News.com, Pemerintah Kota Sukabumi mengumumkan bahwa kasus perceraian di Kota Sukabumi meningkat. Hal tersebut dibuktikan dari data yang tercatat di Pengadilan Agama Kota Sukabumi sejak Januari sampai Juli 2020 terdapat 879 perkara yang ditangani. Sedangkan, pada kurung waktu yang sama pada tahun 2019 hanya mencapai sebanyak 737 perkara (Solahudin, 2020).

Berbeda dengan pengadilan agama lainnya di kabupaten/kota pada wilayah I bogor, Pengadilan Agama Kota Depok selama pandemi COVID-19 membatasi jumlah kasus yang masuk per hari hanya 20 kasus. Hal tersebut bertujuan untuk menekan penularan virus corona. Meskipun jumlah kasus yang masuk telah dibatasi tetapi akumulasi angka perceraian di Kota Depok pada tahun 2020 masih tergolong tinggi (Winoto, 2020).

Wilayah II Purwakarta, meliputi Kab Purwakarta, Kab Subang, Kab Karawang, Kab Bekasi, dan Kota Bekasi. Berdasarkan hasil penelusuran diketahui bahwa fenomena yang sama juga terjadi di Kabupaten Purwakarta. dikutip dari ayapurwakarta.com diketahui bahwa pada mulai terdapat 81 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Purwakarta. Sementara pada bulan Juni hingga akhir tahun mengalami peningkatan yang drastis (Nurhasanudin, 2020).

Dilansir dari rri.co.id, angka perceraian di Pengadilan Agama Subang, Ditengah pandemi COVID-19, hingga pertengahan November 2020 meningkat hingga 76 persen. Rata-rata faktor penyebab terjadinya perceraian tersebut adalah masalah ekonomi (Efendi, 2020). Sedangkan di Kabupaten Karawang dihitung mulai bulan Januari hingga Mei 2020 tercatat 1.118 perkara yang diterima Pengadilan Agama Karawang. Sementara itu, kasus yang diputuskan selama lima bulan dihitung 1.366 pasangan yang bercerai, dengan rata-rata delapan orang bercerai dalam sehari (Suminah, 2020).

Terkait dengan daerah penyangga ibu kota yaitu Bekasi, diketahui bahwa sejak pandemi Bulan Maret 2020, angka perceraian di Kota Bekasi meningkat. Setidaknya dalam kurun waktu enam bulan ada 3.111 pasangan yang bercerai di wilayah tersebut. Angka perceraian tersebut tergolong tinggi, apabila dibandingkan dalam waktu yang sama di tahun 2019 (Fitria, 2020; Azzam, 2020). Fenomena yang sama juga terjadi di Kabupaten Bekasi. Dilansir dari SuaraKarya.Id, angka perceraian di Kabupaten

Bekasi terbilang meningkat berdasarkan data Pengadilan Agama Cikarang, sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 sudah mencapai 1.285 pendaftar (Dharma, 2020).

Wilayah III Cirebon, meliputi Kab Cirebon, Kota Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, dan Kab Kuningan. Berdasarkan hasil penelusuran diketahui bahwa pada bulan Maret, April dan Juni pendaftaran perkara di Kabupaten Cirebon berkisar di angka 500 sampai 600 perkara. Sedangkan, setelah adanya AKB jumlah perkara perceraian naik tajam (Aliansyah, 2020). Hal yang sama juga terjadi di Kota Cirebon, dikutip dari fajarsatu.com, perceraian didominasi oleh pasangan antara usia 35th sampai dengan 45th (Irgun, 2020).

Terkait dengan kabupaten Indramayu, berdasarkan hasil penelusuran diketahui bahwa Kabupaten Indramayu merupakan Kabupaten dengan angka perceraian tertinggi di Jawa Barat. Sekitar saribu pasangan bercerai setiap bulannya di Kabupaten Indramayu (Rahman, 2020). Sedangkan perceraian di Kabupaten Majalengka, berdasarkan hasil penelusuran diketahui bahwa dari Januari hingga Juli 2020 tercatat ada dua ribu pasangan yang bercerai (Yulianto, 2020). Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Kuningan, dikutip dari media online KuninganMass, diketahui kasus perceraian di Kabupaten Kuningan selama masa pandemi COVID-19 fluktuatif. Hal ini terlihat dari meledaknya kasus pada bulan Juni 2020 dengan 388 Kasus. Padahal pada bulan Mei dan April hanya 96 dan 191 kasus (Mustawan, 2020).

Wilayah IV Priangan meliputi Kab Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat, Kab Sumedang, Kab Garut, Kab Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, dan Kota Banjar. Berdasarkan hasil penelusuran diketahui bahwa pada Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Garut terjadi kenaikan secara drastis kasus perceraian selama pandemi. Setidaknya ada tiga ribu warga melakukan gugatan perceraian yang mayoritas karena masalah ekonomi (Iqbal, 2020).

Daerah lain yang mengalami tingkat perceraian yang tinggi di masa pandemi COVID-19 adalah Kabupaten Sumedang. Dilansir dari detiknews.com diketahui sebelum masa pandemi COVID-19 Pengadilan Agama Sumedang dapat melaksanakan persidangan sebanyak 40 perkara, sedangkan pada saat pandemi persidangan naik hingga 50 persen (Rizal, 2020). Sedangkan di Kabupaten Tasikmalaya jumlah

perceraian naik turun. Dikutip dari Ayotasik.com, diketahui angka perceraian pada bulan Februari mencapai 504 pasangan, pada bulan Maret menurun menjadi 332 pasangan, dan April naik menjadi 365 pasangan dan kembali turun pada bulan Mei dengan jumlah 168 pasangan (Muslim, 2020). Terkait dengan kabupaten Ciamis diketahui bahwa setelah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selesai, kasus perceraian di Kabupaten Ciamis melonjak hingga berlipat ganda dimana ada sekitar 170 perkara yang masuk (Aunulloh, 2020).

Sedangkan untuk dua kabupaten di kawasan bandung raya yaitu Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan yang cukup berarti. Dilansir dari Kompas.com Pengadilan Agama Soreang pada Juni 2020 menerima sebanyak 1.012 gugatan perceraian. Padahal, rata-rata pengajuan perceraian berkisar 700 sampai dengan 800 kasus perbulan (Perdana, 2020). Terkait dengan Kabupaten Bandung Barat, angka gugatan perceraian mencapai 1.763 kasus dan menunjukkan kenaikan yang drastis pada bulan Juni 2020 (Priyo, 2020).

Permasalahan perceraian di masa pandemi COVID-19 tidak hanya terjadi di kabupaten yang ada di wilayah IV priangan, tetapi juga di daerah perkotaan seperti Kota Bandung dan Cimahi. Dilansir dari detik news, sebanyak 3.209 janda baru tercatat di Kota Bandung dan Kota Cimahi selama tahun 2020 (Yum, 2020). Menurut Walikota Bandung, Oded M Danial, pada Januari sampai dengan Agustus 2020, sudah ada lima ribu perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Bandung (Septianto, 2020). Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Kota Banjar dan Kota Tasikmalaya. Apabila dilihat dari usia pernikahan, umumnya pasangan yang mengajukan gugatan di daerah perkotaan wilayah IV, memiliki usia perkawinannya masih dibawah lima tahun. Selain itu, pada rentan usia yang paling banyak mengajukan gugatan perceraian adalah rentang usia dari 31th sampai dengan 40th (Riyadi., 2020).

PEMBAHASAN

Menurut Dosen Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Dr. Sakroni, M.Pd, dalam Webinar 7th *Internasional Academia Roundtable Forum* pada tanggal 25 Juli 2020, secara garis besar perceraian pada masa pandemic dapat disebabkan lima hal yaitu: 1) permasalahan

ekonomi; 2) Ketidakseimbangan waktu bersama; 3) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); 4) perubahan pola komunikasi; 5) usia dalam membina perkawinan.

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Levinger (1966) yang menyatakan bahwa dari dua belas kategori keluhan yang menyebabkan terjadinya perceraian di dalam rumah tangga, maka suami mendapatkan proporsi tertinggi pada dua keluhan yaitu : 1) adanya campur tangan dan tekanan dari kerabat istri; dan 2) masalah ketidakcocokan dalam hubungan seksual. Sementara itu, istri mendapatkan proporsi tertinggi pada tiga jenis keluhan yaitu: 1) suami sering melalaikan kewajiban rumah tangga dan anak; 2) suami sering melakukan kekerasan fisik; dan 3) masalah keuangan.

Berdasarkan paparan diatas apabila dikaitkan dengan perceraian di Jawa Barat pada saat pandemi maka perceraian tidak hanya disebabkan oleh satu faktor melainkan banyak faktor seperti masalah ekonomi, ketidakharmonisan, KDRT, dan usia dalam membina hubungan perkawinan.

Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan yang sering memicu perceraian baik itu sebelum maupun pada masa pandemi. Hal tersebut disebabkan banyak suami yang harus kehilangan mata pencahariannya sehingga perekonomian keluarga menjadi terganggu, dan menimbulkan masalah yang serius dalam rumah tangga. Apabila hal tersebut terus dibiarkan maka aspek *mawaddah* sebagai salah satu dari aspek utama pembentuk sakinah akan terganggu (Alghifari, *et al*, 2020; Awaliyah, *et al*, 2021). Oleh sebab itu apabila aspek *mawaddah* terganggu maka harus segera ditanggulangi dengan baik. Selain itu aspek *rahmah* yang merupakan aspek kedua dalam pembentuk sakinah harus dioptimalkan agar dapat menutup aspek *mawaddah* yang terganggu. Melalui hal tersebut diharapkan akan mampu mempertahankan keberlangsungan perkawinan sehingga dapat menekan terjadinya perceraian.

Ketidakharmohonisan dalam berumah tangga dapat disebabkan oleh ketidak seimbangan aktivitas dan waktu bersama pasangan serta pola komunikasi. Hal tersebut dapat dicontohkan seperti dihari normal sebelum pandemi, pasangan yang bekerja tidak memiliki banyak waktu untuk dihabiskan bersama. Pada saat kembali ke rumah sesudah kerja, keduanya lelah dengan berbagai kegiatan sehingga tidak ada waktu untuk saling mengenal satu sama lain dan

membentuk hubungan yang harmonis. Seharusnya waktu karantina di rumah pada masa pandemi dapat dimanfaatkan untuk membentuk keharmonisan tersebut dengan mengenal pasangan. Tetapi perlu diperhatikan dengan lebih banyak waktu bersama dirumah akan mengubah pola komunikasi pasangan (Tristanto, 2021). Dalam banyak kasus, hal tersebut dapat bertindak sebagai pencetus terjadinya perceraian bagi pasangan yang telah memiliki masalah pada pola komunikasi pada pasangan. Hal ini akan lebih diperparah lagi apabila rutinitas sebelum pandemi berfungsi untuk menutupi masalah komunikasi yang ada di dalam keluarga.

KDRT merupakan fenomena gunung es karena lebih banyak kasus yang terpendam dari pada terlihat di permukaan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kekerasan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Masalah KDRT pada masa pandemi COVID-19 sangatlah nyata karena perempuan menjadi salah satu kelompok rentan yang terdampak dan berpeluang besar mengalami kekerasan berbasis gender (KBG). Hal tersebut seperti memburuknya ekonomi keluarga pada saat pandemi sehingga memicu stress dan emosi karena memikirkan biaya hidup sehari-hari. Suami sebagai pencari nafkah utama akan melampiaskan rasa stress, emosi dan frustrasi tersebut pada istri dan anak karena dianggap kelompok yang lemah.

Faktor usia sangatlah berpengaruh dalam membina hubungan berumah tangga. Hal tersebut disebabkan oleh perkawinan dibawah umur membuat pasangan belum siap mengatasi pernak-pernik pertikaian yang ada di dalam rumah tangga terutama pada saat pandemi COVID-19 (Subardhini, 2020; Tristanto, 2022c). Hal tersebut karena pernikahan memerlukan kesatuan tekad, kepercayaan dan penerimaan dari setiap pasangan yang menjalani mahligai rumah tangga. Ketidaksiapan pasangan dapat dipengaruhi oleh usia dan tingkat kedewasaan dalam mengatasi persoalan yang terkait dengan kehidupan, seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, serta pekerjaan setiap pasangan. Perkawinan dibawah umur dan disertai dengan

pendidikan yang rendah akan menyebabkan ketidakdewasaan pasangan dalam mencari jalan keluar dari suatu masalah.

KESIMPULAN

Salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat perceraian tertinggi selama pandemic Covid-19 adalah Jawa Barat. Secara umum faktor penyebab perceraian di Jawa Barat tidak hanya disebabkan oleh satu faktor melainkan banyak faktor seperti masalah ekonomi, ketidakharmonisan, KDRT, dan usia dalam membina hubungan pernikahan. Tidak dapatnya pasangan dalam menyelesaikan berbagai faktor penyebab tersebut maka menimbulkan konflik yang berlarut-larut sehingga akan bermuara pada perceraian.

Menurut penulis idealnya masing-masing pasangan memiliki kepekaan dan memahami masing-masing pasangan agar tidak terjadi kejenuhan dan berkurangnya nilai kasih sayang antar pasangan. oleh sebab itu penulis menyarankan agar setiap pasangan mampu secara emosional mengatur emosinya sendiri dan memberikan ruang bagi orang lain untuk memahaminya. Dalam menyampaikan emosi penting untuk memilih kata dan gaya komunikasi yang baik. Selain itu, ketika mengatakan sesuatu yang mungkin sulit bagi pasangan untuk mendengarkannya maka gunakanlah permulaan yang lembut dan menenangkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada editor dan mitra bestari yang telah memberikan kritik, masukan dan saran terkait dengan penyempurnaan tulisan ini. Selain itu, penulis juga berterimakasih kepada tim redaksi yang telah memberikan kesempatan untuk menerbitkan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2013a). Program Genre dalam Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja. Jakarta, ID: BKKBN.

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2020b). Strategi Komunikasi Risiko di Akar Rumpun. Jakarta, ID: BKKBN.
- Eriyanto. (2001). Analisis wacana: Pengantar analisis teks media. Yogyakarta: LKiS
- Hadi, S. (1995). Metode Research. Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM
- Krippendoff, K. (1993). Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press
- Muhadjir, N. (1998). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi III, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, Realisme-metaphisik, Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama.
- Rafi'i, M. (2000). Selayang Pandang Jawa Barat. Klaten: Intan Prawira
- Sabarguna. (2005). Analisis Data pada Penelitian Kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Subardhini, M. (2020). Perceraian Di Masa Pandemi COVID-19: Masalah Dan Solusi. Dalam Fahrudin, A., Mas'ud, F., Rose, N.M. & Wardani, L.M.I. (eds.), *Dinamika keluarga pada masa pandemic covid-19*. Jakarta: UJM Press.
- Sugiyono (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Willis, S. (2009). *Konseling Keluarga*, Bandung: Alfabeta
- Jurnal**
- Alghifari, A., Sofiana, A., & Mas' ari, A. (2020). Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1(2)
- Apriasari, H., Qotrunnada, K., Al-Jannah, F. M., & Amani, Z. (2021). Divorce in the Covid-19 Pandemic Era: An Integrative Study. In *Proceeding of Inter-Islamic University Conference on Psychology* (Vol. 1, No. 1).
- Awaliyah, R., & Darmalaksana, W. (2021). Perceraian Akibat dampak Covid-19 Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 3(2).
- Bakhtiar, Y. (2020). Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menjadi Alasan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Siak). *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 9(2), 281-294.
- Fauziah, A. S. N., Fauzi, A. N., & Ainayah, U. (2020). Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2).
- Hutabarat, J. S., Krismonika, G., & Lofa, E. (2020). Perempuan Di Tengah Konflik Dan Upaya Membangun Perdamaian Yang Berkelanjutan Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 8(3), 349-358
- Levering, G. (1966). Sources of marital dissatisfaction among applicants for divorce. *American journal of orthopsychiatry*, 36(5), 803-807.
- Tristanto, A. (2020a). Dukungan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial Dalam Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Sosio Informa*, 6(2), 205-222.
- Tristanto, A. (2020b). Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial. *Sosio Informa*, 6(3), 292-304.
- Tristanto, A. (2021). Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Masalah Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 45, No. 1, April 2021, Hal 65-78.
- Tristanto, A., & Setiawati, S. (2022a). Gender Inequality Contributes to Women's Vulnerability to HIV During the Covid-19 Pandemic. In *ICGCS 2021: Proceedings of the 1st International Conference on Gender, Culture and Society, ICGCS 2021, 30-31 August 2021, Padang, Indonesia* (p. 93). European Alliance for Innovation.
- Tristanto, A., & Maizuar, A. (2022b). Strategi Perubahan Perilaku Masyarakat pada Masa Pandemi COVID-19 Melalui Bidang Penyiaran. *Jurnal Studi Inovasi*, 2(1), 26-32.
- Tristanto, A. (2022c). COVID-19 Pandemic and Violence Against Children. *Keluwih: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(1), 12-18.

Website

- Adam, W. (2020) Pemprov Jabar Menilai Angka Perceraian di Jabar Tertinggi (08 September 2020). <https://timejabar.com/bandung-raya/2546/pemprov-jabar-menilai-angka-perceraian-di-jabar-tertinggi.html> . Diakses 16 Desember 2020
- Agustin, S. (2020). Kasus Perceraian di Kabupaten Bogor Meningkat Selama Pandemi Corona (30 Juni 2020) <https://news.detik.com/berita/d-5162726/kasus-perceraian-di-kabupaten-bogor-meningkat-selama-pandemi-corona> . Diakses 16 Desember 2020
- Aliansyah, A. (2020). Perceraian di Cirebon Meningkat Selama Pandemi COVID-19, Dalam Sebulan Seribu Kasus (4 September 2020). <https://www.merdeka.com/peristiwa/perceraian-di-cirebon-meningkat-selama-pandemi-covid-19-dalam-sebulan-seribu-kasus.html> . Diakses 25 Desember 2020
- Aunullah, I.N. (2020). Turun saat PSBB, Angka Perceraian di Ciamis Justru Melonjak hingga 776 Perkara Usai Diakhiri (9 Juli 2020). <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01590023/turun-saat-psbb-angka-perceraian-di-ciamis-justru-melonjak-hingga-776-perkara-usai-diakhiri> . Diakses 19 Desember 2020
- Azzam, M (2020). Di Kota Bekasi Ada 1.042 Istri Gugat Cerai Suami di Masa Pandemi Covid-19 (22 September 2020). <https://wartakota.tribunnews.com/2020/09/22/di-kota-bekasi-ada-1042-istri-gugat-cerai-suami-di-masa-pandemi-covid-19>. Diakses 16 Desember 2020
- Dharma. (2020). Kasus Perceraian Di Kabupaten Bekasi Tinggi Capai 1.285 (17 Juni 2020). <https://www.suarakarya.id/detail/113040/Kasus-Perceraian-Di-Kabupaten-Bekasi-Tinggi-Capai-1285> . Diakses 18 Desember 2020
- Efendi, R. (2020). Di Tengah Pandemi, Angka Perceraian di Subang Tinggi (24 November 2020). https://rri.co.id/bandung/jawa-barat/934504/di-tengah-pandemi-angka-perceraian-di-subang-tinggi?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign . Diakses 15 Desember 2020
- Ferdiaz.Y (2020). Imbas Corona, Jumlah Janda dan Perselingkuhan di Bandung Meningkat Tajam selama Pandemi Covid-19 (2 Juli 2020). <https://health.grid.id/read/352221920/imbascorona-jumlah-janda-dan-perselingkuhan-di-bandung-meningkat-tajam-selama-pandemicovid-19?page=all> . Diakses 18 Desember 2020
- Fitria, R (2020) Angka Perceraian di Bekasi Naik Signifikan saat Pandemi (07 Agustus 2020). <https://www.ayojakarta.com/read/2020/08/07/22472/angka-perceraian-di-bekasi-naik-signifikan-saat-pandemi> . Diakses 20 Desember 2020
- Irgun. (2020). Hingga Pertengahan Juni, 53 Janda Baru Lahir di Kota Cirebon (11 Juni 2020). <https://fajarsatu.com/2020/06/hingga-pertengahan-juni-53-janda-baru-lahir-di-kotacirebon/> . Diakses 16 Desember 2020
- Iqbal, M. (2020). Tinggi Kasus Perceraian di Garut, Tiap Hari Tangani 30 Perkara. (3 September 2020). <https://www.merdeka.com/peristiwa/tinggi-kasus-perceraian-di-garut-tiap-hari-tangani-30-perkara.html> . Diakses 16 Desember 2020
- Muslim, I.W. (2020), Angka Perceraian di Tengah Pandemi Covid-19 di Kabupaten Tasik Menurun (16 Juni 2020). <https://www.ayotasik.com/read/2020/06/16/5565/angka-perceraian-di-tengah-pandemicovid-19-di-kabupaten-tasik-menurun> . Diakses 20 Desember 2020
- Mustawan, A. (2020). Kasus Perceraian Di Kuningan Meledak (16 Juli 2020). <https://kuninganmass.com/kasus-perceraian-di-kuningan-meledak/> . Diakses 16 Desember 2020
- Nurhasanudin, D. (2020). Angka Perceraian di Purwakarta Naik, Apakah Gara-gara Corona (16 Juni 2020). <http://www.ayopurwakarta.com/read/2020/06/16/5295/angka-perceraian-di-purwakartanaik-apaakah-gara-gara-corona>. Diakses 16 Desember 2020
- Perdana, P.P (2020). Tingkat Perceraian di Kabupaten Bandung Melonjak di Masa Pandemi Covid-19 (24 Agustus 2020). <https://regional.kompas.com/read/2020/08/24/13582481/tingkat-perceraian-di-kabupaten-bandung-melonjak-di-masa-pandemicovid-19>. Diakses 17 Desember 2020

- Priyo, G . (2020). Masuk New Normal, Angka Perceraian di KBB Melonjak Hingga 464 Perkara (4 Juli 2020). <https://bangbara.com/masuk-new-normal-angka-perceraian-di-kbb-melonjak-hingga-464-perkara/> . Diakses 17 Desember 2020
- Rahman, H. (2020). Angka Perceraian di Indramayu Tinggi, Rata-rata Setiap Bulan Ada Seribu Pasangan Bercerai. <https://www.tribunnews.com/regional/2020/08/26/angka-perceraian-di-indramayu-tinggi-rata-rata-setiap-bulan-ada-seribu-pasangan-bercerai?page=all>. Diakses 17 Desember 2020
- Ranawati, N.K. (2020). Pertengkaran Jadi Alasan Cerai Terbanyak di Jabar Selama Pandemi. (08 September 2020). <https://ayobandung.com/read/2020/09/08/127154/pertengkaran-jadi-alasan-cerai-terbanyak-di-jabar-selama-pandemi>. Diakses 17 Desember 2020
- Rayadie A. (2020). Perceraian di Kabupaten Sukabumi Meningkat, Banyak Istri Memilih Bercerai dan Menjadi Janda (3 September 2020). <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01715689/perceraian-di-kabupaten-sukabumi-meningkat-banyak-istri-memilih-bercerai-dan-menjadi-janda> . Diakses 18 Desember 2020
- Rizal, M. (2020). Meroket Saat Corona, Angka Perceraian di Sumedang Capai 2.294 Kasus (06 Juli 2020). <https://news.detik.com/berita-jawa-Barat/d-5081760/meroket-saat-corona-angka-perceraian-di-sumedang-capai-2294-kasus> . Diakses 16 Desember 2020
- Riyadi, T. (2020). Angka Perceraian di Kota Bandung Didominasi Pasangan Lulusan SLTA (26 Agustus 2020). <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-13691080/angka-perceraian-di-kota-bandung-didominasi-pasangan-lulusan-sлта>. Diakses 16 Desember 2020
- Septianto, B. (2020). Lima Ribu Perkara Perceraian Ada di Kota Bandung Selama Pandemi. (03 September 2020). <https://tirto.id/lima-ribu-perkara-perceraian-ada-di-kota-bandung-selama-pandemi-f3gc> . Diakses 17 Desember 2020
- Solahudin. (2020). Masa Pandemi, Populasi Janda Di Sukabumi Meningkat (3 Agustus 2020). <https://jabarnews.com/read/89205/masa-pandemi-populasi-janda-di-sukabumi-meningkat>. Diakses 25 Desember
- Sumardiyani, W.R. (2020). Selama Pandemi Covid-19, Kasus Perceraian di Kota Bogor Melonjak (29 Juni 2020). <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01580335/selama-pandemi-covid-19-kasus-perceraian-di-kota-bogor-melonjak>. Diakses 20 Desember 2020
- Suminah. Y (2020). Dampak Corona Perceraian di Karawang Meningkat (30 Juni 2020) <https://www.pasundanekspres.co/opini/dampak-corona-perceraian-di-karawang-meningkat/> . Diakses 19 Desember 2020
- Taufiqurahman. (2020). Ada 2.000 Kasus Perceraian di Cianjur, Salah Satu Pemicunya karena Faktor Ekonomi (30 Juni 2020). <https://regional.kompas.com/read/2020/06/30/19372991/ada-2000-kasus-perceraian-di-cianjur-salah-satu-pemicunya-karena-faktor?page=all> . Diakses 16 Desember 2020
- Twitter stefhaniequeen (28 Agustus 2020). Diakses dari <https://twitter.com/stefhaniequeen> (16 Desember 2020)
- Vincent. (2020). Pertumbuhan Ekonomi RI Q2 2020 Minus 5,32%, Terburuk Sejak 1999 (5 Agustus 2020). <https://tirto.id/pertumbuhan-ekonomi-ri-q2-2020-minus-532-terburuk-sejak-1999-fVQk> . Diakses 16 Desember 2020

Winoto. (2020). Mendadak, 568 Wanita di Depok Menjadi Janda, Akibat Perceraian Masih Tinggi (30 Agustus 2020)<https://poskota.co.id/2020/8/30/mendadak-568-wanita-di-depok-menjadi-janda-akibat-perceraian-masih-tinggi> . Diakses 16 Desember 2020

Yulianto, E. (2020). Angka Perceraian Tergolong Tinggi, Hingga Bulan Juli 2020 Ada 2.783 Janda Baru di Majalengka (13 Agustus 2020). https://cirebon.tribunnews.com/2020/08/13/angka-perceraian-tergolong-tinggi-hingga-bulan-juli-2020-ada-2783-janda-baru-di-majalengka?_ga=2.164821497.753761276.1621672428-256569698.1619363104. Diakses 18 Desember 2020

Yum. (2020). 4 Bulan Pandemi Corona, ADA 3.209 Janda Baru di Bandung dan Cimahi (27 Juni 2020). <https://news.detik.com/berita-jawa-Barat/d-5071166/4-bulan-pandemi-corona-ada-3209-janda-baru-di-bandung-dan-cimahi>. Diakses 18 Desember 2020

Yusuf. (2020). Perceraian Menumpuk Selama Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat, Subaya dan Semarang. (28 Agustus 2020). <https://www.inews.id/news/nasional/perceraian-menumpuk-selama-covid-19-terbanyak-di-jawa-Barat-subaya-dan-semarang>. Diakses 20 Desember 2020

Seminar atau Koferenasi

Sakroni. (2020). Penyebab Perceraian Di Jawa Barat Pada Masa Pandemi COVID-19. Disampaikan dalam Webinar 7 th Internasioanal Academia rountable forum (25 Juli 2020)